

SOP PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Aktivitas	Kepala Dinas	Sekretaris	Tim Perencanaan	Tim Urusan / Sekretariat	Bappeda	Mutu Baku			Ket
							Persyaratan/ perlengkapan	Durasi	Output	
1	Mendisposisi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)						Surat Penyusunan IKU/Indikator Kinerja	30 menit	Disposisi Surat Penyusunan IKU	
2	-Melakukan pembahasan penyusunan IKU -Melakukan penyiapan data dan informasi perencanaan IKU -Melakukan verifikasi data IKU						Regulasi, referensi, worksheet berkenaan dengan IKU, analisis data capaian kinerja	600 menit	Rekapitulasi data IKU, data capaian kinerja yang telah diverifikasi	
3	melakukan rapat pembahasan fase rancangan awal IKU						Data capaian kinerja diverifikasi, surat undangan, daftar hadir	180 menit	Rancangan data IKU	
4	Menyusun draft Rancangan Indikator Kinerja Utama (IKU)						Rancangan data IKU	120 menit	Draft Data capaian kinerja	
5	Mencermati dan menyetujui rancangan IKU						Data capaian kinerja diverifikasi	120 menit	Rancangan data IKU	
6	Melakukan konsultasi /desk dan menyerahkan rancangan IKU ke Bappeda						Rancangan data IKU	600 menit	Rancangan data IKU yang sudah diverifikasi	
7	Memverifikasi rancangan IKU						Rancangan IKU	180 menit	Catatan hasil konsultasi/desk, Berita Acara	
8	Memperbaharui Rancangan IKU berdasarkan hasil masukan konsultasi/desk dengan Bappeda						Catatan hasil konsultasi/desk, Berita Acara	300 menit	Rancangan data IKU yang sudah diverifikasi	
9	Memeriksa rancangan IKU						Rancangan data IKU yang sudah diverifikasi	60 menit	Rancangan data IKU yang sudah diverifikasi	
10	Mencermati dan menyetujui rancangan IKU						Rancangan data IKU yang sudah diverifikasi	30 menit	Dokumen IKU yang sudah divalidasi	
11	Penyerahan dokumen IKU						Dokumen IKU	180 menit	Tanda terima penyerahan dokumen IKU	



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 45 /SEKRT/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Penyusunan Cascading

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Adminstrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat3. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi , Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.201-Org/2020 tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami penyusunan RPJMD/Renstra Perangkat Daerah;2. Memahami Penyusunan Indikator Kinerja Utama;3. Memahami penyusunan perencanaan dan pelaporan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan IKU2. SOP Pengelolaan Naskah Surat Masuk/Keluar3. SOP Peminjaman Ruang Rapat4. SOP Pelaksanaan Pengumpulan Data	Komputer/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Alat Komunikasi, ATK, data perencanaan dan pelaporan, dan data kinerja, Peta Jabatan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya penyusunan dokumen Perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Individu	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali